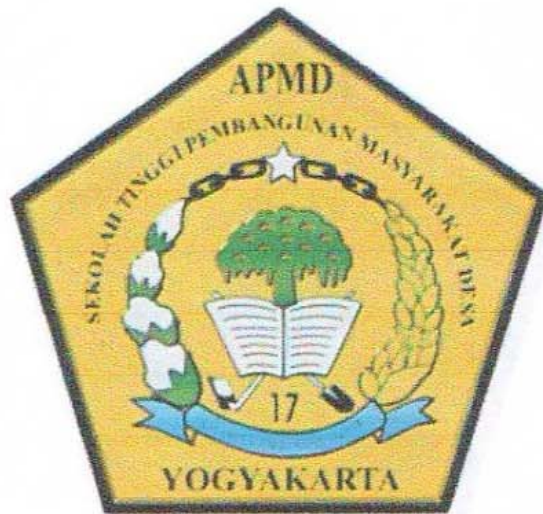


**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kabupaten Tana Tidung,
Kalimantan Utara)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ADRIANUS MADE

NIM : 12520038

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

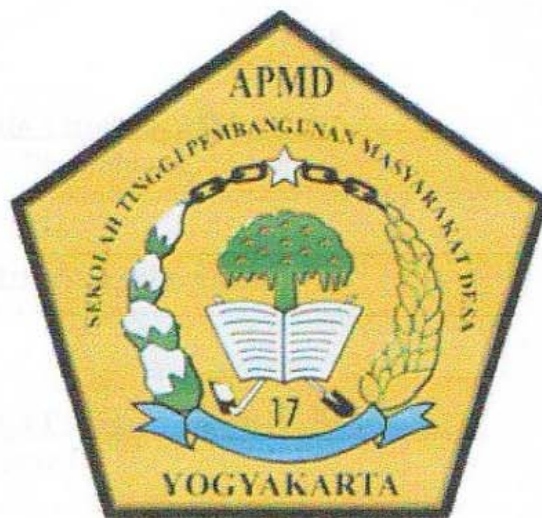


**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kabupaten Tana Tidung,
Kalimantan Utara)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Kesarjanaan (S-1)



Disusun Oleh :

ADRIANUS MADE

NIM : 12520038

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Pada Hari : Senin

Tanggal : 03 Oktober 2016

Waktu : 01.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama : **TIM PENGUJI** Tanda tangan

1. **Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si**
Ketua/Penguji/Pembimbing
2. **Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.**
Penguji Samping I
3. **Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si.**
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Progam Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2016

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusus selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.

Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Amiinnn.

MOTTO

*“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”
(Nelson Mandela)*

Harta yang tak habis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak ternilai adalah pendidikan.

Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar

Orang berilmu tentu memiliki kepribadian yang tangguh, yang bisa membawa diri, keluarga dan orang lain menuju kebahagiaan, serta bernilai manfaat bagi sesame.

Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa bersyukur, tentu akan memberikan hasil yang baik,

Peperangan tidak dimenangkan dengan jumlah, akan tetapi dengan keberanian dan ilmu pengetahuan.

Terus menggali ilmu dan pengetahuan baru, maka engkau akan bisa mengenali dan mengembangkan kemampuan diri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Jalannya Pemerintahan Daerah. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta KAHARUDIN dan Ibunda yang kusayangi YASINTA YAPI yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga TUHAN selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih juga tidak lupa penulis berikan kepada Bapak Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. **Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Gregorius Sahdan, S. IP, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta.
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Almamater kebesaran, terima kasih atas jasa mu dalam setiap perjalanan selama menempuh teori dan penyelesaian kuliah.
5. Bapak/ibu dosen, yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi S1 ilmu Pemerintahan Angkatan 2012.

Seluruh teman-teman tanpa terkecuali (Persahabatan dan kebersamaan kita tak akan kulupakan), yang selalu membantu di dalam penyusunan skripsi dan juga ucapan terimakasih atas perhatian kalian semua. Noven, ogi, Gunawan, Sandi, Tungkris, Samson dan untuk semua yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu terimakasih untuk semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
SINOPSIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Perwakilan Politik	9
2. Fungsi Perwakilan.....	12
3. Sistem Perwakilan.....	15
4. Macam-Macam Lembaga Perwakilan.....	17
5. Hubungan Wakil dengan Yang Diwakili	18
6. Fungsi Pengawasan	21
7. Macam-Macam Pengawasan.....	23
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	28

G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Unit Analisis	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisa Data.....	32
BAB II PROFIL DPRD KABUPATEN TIDUNG.....	33
A. Selayang pandang Kabupaten Tana Tidung.....	33
B. Kelembagaan DPRD Kabupaten Tana Tidung	36
1. Bagian Umum	36
2. Sub Bagian Tata Usaha Dan Umum	37
3. Sub Bagian Program Dan Keuangan	39
4. Sub Bagian Dokumentasi Dan Pelayanan Informasi	40
5. Bagian Hukum Dan Persidangan	42
6. Sub Bagian Persidangan Dan Risalah	44
7. Sub Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan	46
8. Sub Bagian Pengkajian Dan Pengolahan Data	47
C. Keanggotaan DPRD	51
1. Jumlah anggota DPRD fraksi dan partai	51
2. Jumlah DPRD berdasarkan komisi	52
3. Jumlah anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan.....	53
4. Jumlah anggota DPRD umur dan jenis kelamin	53
5. Jumlah anggota DPRD berdasarkan tingkat pendidikan	54
D. Sekretariat DPRD	55
1. Visi Misi	57

2. Struktur Organisasi	58
3. Tugas pokok dan fungsi	58
BAB III ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM JALANNYA PEMERINTAHAN DAERAH	66
A. Analisis fungsi legislasi	69
B. Analisis Fungsi pengawasan anggaran	82
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keanggotaan DPRD	51
Tabel 2.2 Jumlah anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan	53
Tabel 2.3 Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin	53
Tabel 2.4 Jumlah anggota DPRD menurut umur	54
Tabel 2.5 Jumlah anggota DPRD berdasarkan tingkat pendidikan.....	54
Tabel 2.6 Keadaan pegawai secretariat DPRD berdasarkan jenis kelamin....	61
Tabel 2.7 Keadaan pegawai secretariat DPRD berdasarkan tingkat pendidikan	62
Tabel 2.8 Keadaan pegawai secretariat DPRD berdasarkan umur pegawai ..	63
Tabel 2.9 Komposisi pegawai secretariat DPRD berdasarkan masa kerja	64
Tabel 3.1 Narasumber menurut kelompok umur	67
Tabel 3.2 Narasumber menurut jenis kelamin	68
Tabel 3.3 Narasumber menurut jabatan	68
Tabel 3.4 Narasumber menurut pendidikan	69

SINOPSIS

Latar belakang penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah, memiliki tiga tugas pokok yakni, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Kontrol). Hal ini penulis menganggap peran DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi pokoknya yaitu, Legislasi, Anggaran dan pengawasan (kontrol) begitu penting karena kapasitas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut sangat menentukan keberpihakan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu berbagai macam persoalan muncul dikalangan para anggota Dewan baik Pusat maupun Daerah yang sering sekali menjadi sorotan tajam bagi seluruh lapisan masyarakat dikarenakan banyak sekali para Wakil Rakyat yang terjerat oleh kasus korupsi. Kasus korupsi inilah yang telah menjerat para anggota DPRD khususnya DPRD Kabupaten Tana Tidung pada saat ini yang sangat jauh dari harapan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada para anggota DPRD yang terpilih.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan, melukiskan dan mendeskripsikan keadaan dan berupa gambar, kata-kata dan bukan angka dan yang ada berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan realita dan informasi yang ada dilokasi penelitian. Adapun jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, penulis menggunakan tiga komponen analisis yaitu, pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data dan memilah-milahnya hingga menjadi data yang dapat di kelola.

Dari analisis data yang penulis lakukan terkait Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tana Tidung yaitu, pengawasan Legislasi, Anggaran dan Pengawasan (kontrol) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait tiga pokok utama yang dimiliki oleh DPRD dari berbagai masalah yang timbul saat ini yang tidak lepas hubungannya dengan keberadaan DPRD Kabupaten Tana Tidung sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat. Banyak sekali kasus dan atau masalah yang terjadi di Pemerintahan khususnya Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Salah satu contoh kasus yang begitu mencuat adalah adanya temuan dana APBD yang menyimpang yang dilakukan oleh eksekutif bersama oknum-oknum terkait dan para anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung tidak terlepas pula oleh kasus ini, dari beberapa contoh kasus yang penulis temukan membuktikan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD TanaTidung sangatlah tidak berarti atau dengan kata lain seluruhgerak eksekutif beserta jajarannya nyaris tanpa pengawasan yang berarti yangdilakukan oleh DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan hasil observasi penulis temukan dari perda yang sudah disahkan atau sudah dibuat pihak DPRD bersama Bupati tidaklah sesuai dengan isu yang sedang timbul di tengah masyarakat Kabupaten Tana Tidung, contoh isu seperti permasalahan tentang pohon madu antara masyarakat dengan pihak perusahaan, mengenai anggaran terlihat para anggota DPRD yang sangat bernafsu apalagi terkait adanya proyek pembangunan demi kepentingan pribadi mereka lah menjadi actor terdepan yang kemudia bekerjasama dengan pihak swasta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 telah membawa angin perubahan bagi sistem pemerintahan di Indonesia, bahkan tidak hanya pada pemerintahan pusat tetapi juga merambah pada pemerintahan daerah. Salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah dalam melaksanakan Demokratisasi bagi pemerintahan daerah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diperbaharui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, atas penyelenggaraan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. (Muhi, Ali Hanapiah, MP.)

Namun demikian disisi lain, UU Nomor. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang yang sebelumnya dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan banyak dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki., disamping itu, dengan dimilikinya wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, terbuka peluang untuk tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN). Di daerah-daerah.

Pemerintahan daerah di Era Otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme

birokrasi. Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari dua unsur penting didalamnya, menurut Muhi, Ali Hanapiah, MP. yaitu: *pertama*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintahan daerah. *Kedua*, lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah), yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya.

Otonomi daerah di Indonesia sebenarnya berhadapan dengan persoalan desentralisasi semu akibat logika-logika kepartaian yang sangat sentralistik sangat disayangkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah dalam tubuh eksekutif ternyata tidak diikuti oleh pola yang sama dalam tubuh legislatif di daerah. Tidaklah mengherankan jika kemudian para pejabat politik di daerah lebih banyak tunduk pada komando DPP partainya, ketimbang pada kepentingan masyarakat dan daerahnya. (Muhi, Ali Hanapiah, MP.)

Secara empirik desentralisasi bukan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel dan responsif pada rakyat, tetapi justru menjadi predator yang korup. Kepala Daerah dan DPRD merupakan predator terdepan. Banyak di antara Kepala Daerah yang korupsi. Ada sebuah pemeo bahwa bupati pada tahun pertama akan menghitung anggaran untuk kepentingan dirinya, tahun kedua akan berhitung bersama DPRD, tahun ketiga berpikir tentang anggaran untuk rakyat, serta tahun ketiga dan keempat ia melancarkan kebijakan populis dengan cara membagi-bagi anggaran untuk rakyat dengan tujuan agar terpilih kembali periode lima tahun berikutnya. (Muhi, Ali Hanapiah, MP.)

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang

dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban oleh DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balance*. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan.

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dinilai sebagian masyarakat belum optimal. Masyarakat mengkritik bahwa anggota DPRD dinilai tidak profesional. DPRD dianggap tidak profesional karena belum/tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat, cenderung dilaksanakan "asal-asalan" oleh pemerintah daerah. Setidaknya ada tiga anggapan yang sering muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD.

Pertama, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif terhadap Kepala Daerah. Anggapan ini muncul umumnya dari para pengamat politik yang cenderung menilai peranan Kepala Daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas Kepala Daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi dan pengawasan. Anggapan ini muncul dari pejabat eksekutif daerah.

Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan Kepala Daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya muncul dari kalangan anggota DPRD. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih sangat lemah.

Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Namun disayangkan tidak mendapat respon dan perhatian yang memadai oleh anggota DPRD. Fungsi pengawasan masih dianggap sepele oleh mayoritas anggota DPRD. Namun yang berbeda terjadi, apabila pengawasan terkait anggaran. Anggota DPRD cenderung lebih tanggap hilangnya anggaran, sebaliknya hal yang berbeda terjadi jika terkait dengan pengawasan pembangunan, anggota DPRD cenderung kurang tanggap dan bersikap ogah-ogahan.

Masih banyak di antara anggota DPRD yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu dipahami pula dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih (*over lapping*) diantaranya berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya, pada gilirannya diharapkan efektivitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib dan lancar dalam suasana yang kondusif dapat tetap terjaga. Jika ini tidak dipahami oleh

anggota DPRD, maka tidak mustahil akan terjadi gesekan antara DPRD dengan lembaga-lembaga pengawas yang ada. (Muhi, Ali Hanapiah, MP.)

Pernyataan bahwa keanggotaan perwakilan adalah jabatan politis yang ditentukan atas dasar dukungan politik dari pemilih memang tidak salah, karena kenyataannya demikian. Tapi bukan berarti bangsa ini diharuskan toleran terhadap orang-orang yang hanya sekedar mau tapi tak mau. Jika hal ini terjadi, maka demokrasi yang dilahirkan dengan air mata dan darah rakyat kemungkinan hanya akan memberi peluang bagi berkuasanya orang-orang “bodoh” dan rakus tetapi dipayungi legitimasi. Berikutnya orang-orang itu tentu akan tega memakan induk semang (Rakyat) yang telah melahirkannya,

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah, satu hal yang sangat diharapkan oleh rakyat adalah manfaat otonomi bagi peningkatan kesejahteraan yang telah diamanatkan kepada para pemimpin di daerah. Pasca pemilu legislatif, masyarakat menaruh harapan besar kepada wakil-wakilnya di DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan yang selama ini telah dinantikan. Namun selagi harapan itu belum ada kejelasan, ternyata masyarakat dihadapkan pada berbagai fenomena yang membuat harapan itu menjadi kecut. Banyaknya kasus seperti korupsi, pemborosan anggaran untuk studi banding, pemalsuan ijazah, sampai dengan perselingkuhan, hamir setiap hari tersaji di berbagai media.

Kekecewaan makin terakumulasi ketika kapasitas para DPRD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya masih sangat lemah. Hal itu tidak terlepas dari sistem pemilu yang tidak menjamin didapatkannya anggota-anggota perwakilan yang berkualitas. (Triputro, R. Widodo dkk, 2007 : 61-62)

Kabupaten Tana Tidung, merupakan kabupaten yang berdiri sejak Tahun 2007, melalui persetujuan rapat paripurna DPR RI tepatnya pada tanggal 17 juli 2007. Memasuki usianya yang kesembilan, Kabupaten Tana Tidung telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Didalam menjalankan pemerintahannya tentu saja diperlukan orang-orang yang dipilih dan dipercaya oleh Rakyat untuk mewakili mereka di badan pemerintahan daerah.

Kabupaten Tana Tidung yang tergolong masih berusia muda memerlukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi untuk bekerja mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai, seperti kesejahteraan masyarakat dan kerukunan antar warga. Tentu saja hal itu hanya akan tercapai ketika orang-orang didalam pemerintahan menjadi pelopor utama dan terdepan untuk mengajak dan mengusahakan Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabupten yang maju dan berintegritas. Tujuan Kabupaten Tana Tidung hanya akan tercapai bila orang-orang didalam birokrasi atau pejabat pemerintahan khususnya DPRD memiliki kesadaran dan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita itu.

Demi terselenggaranya pemerintahan yang baik di Kabupaten Tana Tidung tentu saja perlu adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh DPRD. Posisi DPRD dalam pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tana Tidung terasa sangat kurang dan atau belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa kali adanya indikasi korupsi, adanya dugaan pemindahan dana APBD dari BANK satu ke BANK lainnya, yang terjadi di Badan Pemerintah Daerah Tana

Tidung. Ini hanyalah salah satu contoh kasus yang terjadi saat ini yang sudah terdengar khususnya bagi kalangan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Hal inilah yang seharusnya menjadi salah satu tugas DPRD mengawasi semua gerak eksekutif, bukan malah menjadi salah satu pemain atau aktor karena hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, karena masyarakat sudah mempercayakan semuanya yaitu melalui DPRD.

Harus diketahui bahwa DPRD memiliki beberapa fungsi, fungsi utama yaitu; *pertama*, fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah. *Kedua*, fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran. *Ketiga*, fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang undangan.

Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi ketiga merupakan pembahasan utama yang penulis susun. Penulis merasa tertarik mengangkat tema ini yaitu “pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” karena adanya aduan masyarakat tentang perwakilan DPRD khususnya dalam pengawasan yang tidak maksimal. Ditambah lagi transisi dari Kabupaten Induk sebelum dimekarkan menjadi wilayah otonom baru belum terselesaikan.

karena tema ini menurut penulis sangat relevan dan penting dalam roda pemerintahan daerah. Tanpa adanya DPRD dibadan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Tana Tidung maka roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan aspirasi rakyat akan sangat sulit sampai ke pemimpin tertinggi daerah (BUPATI).

Namun sangat disayangkan perilaku politik anggota Dewan lebih mementingkan diri sendiri dan kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat fungsi dewan yang diharapkan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jalannya pemerintahan tenggelam oleh kepentingan mereka untuk memperoleh kekuasaan, jabatan dan uang. Ditambah lagi di daerah, elit politik yang berasal dari partai-partai politik baru dan berhasil menjadi anggota DPRD justru memanfaatkan momentum reformasi untuk memanipulasi posisi strategis mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, mengenai mengapa penelitian ini harus dilaksanakan, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu:

Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tana Tidung dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tana Tidung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama dan agar tidak terjadi penyimpangan APBD yang sudah terjadi seperti saat ini.

Hal yang dapat dilakukan DPRD Tana Tidung guna untuk lebih mempertajam kemampuan atau pengetahuan, yaitu dengan melakukan Bimtek Tentang Akuntansi Publik Lokal dan Fungsi Mekanisme Penganggaran. Agar fungsi Pengawasan khususnya dibidang Anggaran Dapat berjalan secara maksimal dan terhindar dari korupsi, bukannya hanya memanfaatkan momentum saat menjadi anggota DPRD untuk kepentingan partai dan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel online, <http://evilaws.blogspot.co.id/2013/11/analisis-yuridis-kedudukan-dewan.html>, diunduh, 25/04/2016, jam 00:23
- Artikel online, <http://maulidil.blogspot.co.id/2009/06/peran-pengawasan-dewan-perwakilan.html>, diunduh 18/04/2016 jam 10:40
- BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta 1993.
- Fuandy, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. PT Rafika Aditama. Bandung. 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Karim, Abdul Gafar (Ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta tahun 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhi, Ali Hanapiah, MP. , *Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/PENGAWASAN.DPRD-Jurnal.2011.pdf>. 19/04/2016, jam 02:22

Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*, 2007. Nusamedia, Bandung.

Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 452-454.

Tripuro, R. Widodo dkk, *Fungsi-Fungsi Legislatif Daerah*, APMD Press, Yogyakarta, 2007.

Tripuro, R. Widodo dkk, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, APMD Press, Yogyakarta 2005

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

UU nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Tidung

Radarkaltara, download 10-6-2016 jam 14:00

Kaltaracoment, download 10-6-2016 jam 14:00

Beritakaltim.com download 10-6-2016 jam 14:00

Newstara TARAKAN download 10-6-2016 jam 14:00

Jurnal Kaltara / Istimewa download 10-6-2016 jam 14:00

PANDUAN WAWANCARA

1. IDENTITAS NARASUMBER

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan
- c. Umur :
- d. Pendidikan terakhir :

2. PERTANYAAN

- a. Pengawasan pembentukan perda (legislasi).